BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan SUTT/SUTET Oleh PT PLN UIP SBT (Persero) Di Kabupaten Dharmasraya” dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan teknis di lapangan menunjukkan bahwa PLN telah melakukan berbagai upaya untuk menjalankan tahapan tersebut secara prosedural dan partisipatif, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melibatkan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dalam proses komunikasi. Namun demikian, proses ini tetap menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam aspek administrasi pertanahan. Permasalahan umum yang dihadapi antara lain adalah tidak adanya sertifikat resmi atas sebagian bidang tanah yang dibebaskan, kepemilikan ganda, serta keberatan dari pemilik tanah atas nilai ganti rugi yang dinilai belum mencerminkan nilai pasar secara wajar.
2. Kendala dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan SUTT/SUTET oleh PT PLN (Persero) di Kabupaten Dharmasraya adalah terhambatnya proses pengalihan hak atas tanah yang telah dibebaskan kepada negara atau kepada PLN sebagai instansi pengguna. Dalam banyak kasus, meskipun ganti rugi telah dibayarkan secara penuh kepada pemilik tanah, namun proses balik nama dan pensertifikatan tanah belum segera dilaksanakan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara status fisik dan administratif tanah.

Kondisi ini berisiko menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi, di mana tanah yang secara faktual telah digunakan untuk pembangunan proyek justru secara yuridis masih tercatat sebagai milik pribadi. Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan bahwa sertifikat tanah yang telah dibebaskan masih dijadikan agunan pinjaman di lembaga perbankan, yang menciptakan kerentanan terhadap sengketa hukum. Terhambatnya proses pengalihan hak ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya sumber daya PLN untuk menyelesaikan seluruh proses administratif secara cepat.

3. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk membangun infrastruktur strategis ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) memikul tanggung jawab hukum, administratif, dan sosial dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan tanah diselesaikan dengan baik, termasuk proses pengalihan hak secara sah. Keterlambatan dalam proses pensertifikatan tanah yang telah dibebaskan tidak hanya menunjukkan ketidakterpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap negara. Dalam perspektif hukum, PLN dapat dikenai tanggung jawab perdata jika terbukti bahwa kelalaian tersebut menyebabkan kerugian atau hilangnya aset negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab, PLN telah melakukan sejumlah upaya, termasuk bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah yang masih diagunkan di bank melalui jalur non-litigasi. PLN juga berkomitmen untuk menanggung seluruh biaya administrasi dalam proses pemisahan dan balik nama sertifikat serta melakukan sosialisasi kepada pemilik tanah untuk mempercepat pemenuhan prosedur hukum. Langkah ini

menunjukkan bahwa PLN tidak hanya bertanggung jawab atas aspek teknis pembangunan, tetapi juga terhadap tertib administrasi dan kepastian hukum penguasaan tanah untuk proyek ketenagalistrikan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan tanah ke depan, PLN disarankan memperkuat kerja sama dengan instansi pertanahan dan pemerintah daerah dalam mempercepat validasi dokumen kepemilikan tanah, khususnya untuk tanah yang belum bersertifikat. Selain itu, penting untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat sejak awal perencanaan proyek, agar mereka memahami urgensi proyek, tahapan pengadaan, hak-hak mereka, serta mekanisme keberatan yang tersedia. Penilaian harga tanah oleh pihak independen juga perlu dilaksanakan secara transparan dan komunikatif, dengan menyediakan forum klarifikasi hasil penilaian bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih lancar dan mendapat dukungan dari masyarakat yang terdampak.
2. PT PLN (Persero) perlu mengalokasikan sumber daya khusus untuk menangani aspek administrasi dan legalitas pengadaan tanah secara lebih fokus dan terstruktur. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah membentuk tim khusus yang bertanggung jawab penuh atas proses sertifikasi tanah hasil pengadaan. Koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional dan pihak perbankan juga harus ditingkatkan, terutama dalam menyelesaikan tanah-tanah yang masih berstatus sebagai agunan. Selain itu, PLN perlu menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap status administrasi setiap bidang tanah yang telah dibebaskan untuk

memastikan tidak ada kelalaian dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi. Dengan penyelesaian administrasi yang cepat dan akurat, kepemilikan tanah akan menjadi sah secara hukum, mendukung kelancaran pembangunan, serta melindungi kepentingan negara dalam jangka panjang.

3. PT PLN (Persero) perlu memperkuat pelaksanaan tanggung jawab hukumnya secara menyeluruh dengan memastikan setiap proses administratif pengadaan tanah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai prosedur hukum. Dalam hal ini, kerja sama dengan institusi hukum seperti Kejaksaan harus diperluas, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga legalitas aset negara. Selain itu, perlu dikembangkan sistem pencatatan digital yang terintegrasi antara PLN, BPN, dan pemerintah daerah untuk melacak status pengalihan hak atas tanah secara real time. PLN juga harus terus mendampingi masyarakat pemilik tanah dalam proses pemisahan dan pemecahan sertifikat untuk menghindari ketidaktahuan atau ketidaksengajaan yang dapat memperlambat proses hukum. Dengan pelaksanaan tanggung jawab hukum yang kuat, PLN akan mampu menjaga integritas proyek nasional dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan dengan dukungan hukum dan sosial yang memadai.